

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fokus Utama Penelitian

Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya membangun dan mempersiapkan bangsa Indonesia untuk tinggal landas. Kecendrungan kehidupan di Indonesia menjelang tinggal landas dilukiskan dengan kehidupan yang optimistik di satu pihak tetapi kehidupan yang dinamis, penuh kerumitan dan tantangan di pihak lain (Engkoswara, 1986:62). Kualitas sumber daya manusia adalah kesadaran manusia terhadap eksistensinya sebagai manusia, manusia yang menyadari eksistensi dirinya atau keberadaannya. Kesadaran eksistensi manusia dicerminkan oleh upaya memperkuat ketahanan dirinya agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan melaksanakan peranannya dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga peranannya mempunyai makna dalam hidupnya (Soepardjo Adikusumo, 1989:35).

Peranan pendidikan dalam membangun masa depan bangsa mempunyai posisi yang amat penting dan strategis. Pandangan umum yang menyebutkan bahwa kualitas manusia Indonesia seutuhnya amat ditentukan oleh kualitas pendidikan nasionalnya. Pemikiran yang meletakkan posisi pendidikan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Pendidikan itu perlu dioptimalkan secara efektif dan efisien, terarah dan terkoordinasi.

sikan secara terpadu untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Mohammad Fakry Gaffar, 1986:1).

Jelaslah peranan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia amat perlu ditingkatkan, karena kita menyadari bahwa manusia itu sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Pendidikan teknik menengah kejuruan merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan teknik menengah kejuruan menempati posisi yang amat strategis, karena lembaga pendidikan ini menghasilkan tenaga kerja dengan kualifikasi tenaga teknisi tingkat menengah. Tenaga teknisi tingkat menengah amat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

Pendidikan teknik menengah kejuruan selama ini dinilai masih memiliki efisiensi yang rendah dibandingkan dengan biaya pengelolaan lebih tinggi. Pendidikan teknik memberikan nilai lebih rendah, dibandingkan dengan pendidikan menengah umum.

Asumsi bahwa pendidikan teknik menengah kejuruan memiliki kontekstual dengan kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Keterkaitan pendidikan dengan pembangunan bidang ekonomi yang dikemukakan oleh (Mohammad Fakry Gaffar, 1986:7) yaitu keterkaitan pendidikan dengan usaha-usaha pembangunan berbagai sektor kehidupan manusia, terutama kehidupan ekonominya. Konsep "investment in education"

atau "investment in human capital", memerlukan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memusatkan pada program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

Pendidikan teknik menengah kejuruan diasumsikan dapat menghasilkan tamatannya memiliki keterampilan tenaga teknis tingkat menengah. Tenaga teknis tingkat menengah dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Keterampilan yang dimiliki oleh teknisi, sehingga ia dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Keterampilan yang dimiliki oleh para teknisi itu mempunyai nilai ekonomi.

Kajian tentang studi kebijaksanaan menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif dan interdisipliner. Analisis kebijaksanaan pendidikan ialah suatu analisis untuk menemukan kebijaksanaan pemerintah tentang pendidikan. Mengapa pemerintah melakukan kebijaksanaan pendidikan tersebut?. Berdasarkan kebijaksanaan itu, apa hasil dan dampaknya dalam bidang pendidikan?. Ruang lingkup kebijaksanaan pendidikan ini dikembangkan oleh (Achmad Sanusi dan Supandi, 1987:18) yang mengutip pendapat (Thomas R. Dye, 1978:2) ialah apa yang dilakukan pemerintah tentang pendidikan, mengapa pemerintah melakukan pendidikan, dan apa dampaknya terhadap kebijaksanaan pendidikan tersebut.

Pengertian analisis kebijaksanaan ini dikemukakan oleh (Stuart S. Nagel, 1980:15) sebagai kajian tentang:

hakekat, kasus, dan dampak dari berbagai alternatif kebijaksanaan umum. Kadang-kadang dikhususkan kepada metoda-metoda yang digunakan dalam menganalisis kebijaksanaan umum.

Oleh karena itu, ruang lingkup analisis kebijaksanaan dapat dilakukan dengan: mengidentifikasi secara sistematis masalah-masalah atau dampak kebijaksanaan pemerintah. Analisis kebijaksanaan tersebut harus menggunakan standar ilmiah.

Analisis kebijaksanaan dapat dilakukan secara: deskriptif, retrospective, evaluatif, dan prediktif. Analisis kebijaksanaan deskriptif yaitu menganalisis suatu kebijaksanaan yang bersifat historis. Kebijaksanaan retrospective yaitu menganalisis kebijaksanaan dengan jalan mendeskripsikan dan menafsirkan kebijaksanaan masa lampau. Kebijaksanaan evaluatif yaitu menganalisis suatu kebijaksanaan yang bersifat mengevaluasi suatu program. Kebijaksanaan prediktif yaitu menganalisis kebijaksanaan untuk memproyeksikannya masa yang akan datang. Kebijaksanaan preskriptif yaitu menganalisis memberikan rekomendasi tindakan.

Pandangan linier, analisis kebijaksanaan pendidikan dapat dilakukan sesudah pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Pandangan komprehensif, analisis kebijaksanaan pendidikan dapat dilakukan pada tahap: perumusan

kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian kebijaksanaan. Atau analisis kebijaksanaan itu dapat juga dilakukan pada semua proses kebijaksanaan. Proses kebijaksanaan ini dikemukakan oleh (Achmad Sanusi dan Supandi, 1987:30) yaitu proses kebijaksanaan menjadi tiga tahap utama seperti: perumusan kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, dan penilaian kebijaksanaan.

Di Indonesia para perumus kebijaksanaan pendidikan terdiri dari: MPR, DPR, Presiden, Menteri, Dirjen, Rektor, Kakanwil dan sebagainya. Di samping badan resmi itu, terdapat juga peserta non-struktural yang dapat mempengaruhi suatu kebijaksanaan. Peserta non-struktural itu terdiri dari: parpol dan golkar serta lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu, tokoh perorangan dapat juga mempengaruhi suatu kebijaksanaan pendidikan seperti: Slamet Imam Santoso, Sumitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dan sebagainya.

Kebijaksanaan nasional pendidikan teknik dan kejuruan dirumuskan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yaitu peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.

Salah satu tindak lanjut pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan untuk mendirikan lembaga pendidikan teknik dan kejuruan yang bersifat pendidikan dalam jabatan. Kebijaksanaan ini, sesuai dengan keputusan Mendikbud tanggal 23

Juni 1978 tentang pendirian Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung (PPPG Teknologi Bandung). PPPG Teknologi Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis dan bertugas melaksanakan penataran yang bersifat pendidikan dalam jabatan. PPPG Teknologi Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Dikdasmen.

Sekolah Teknologi Menengah (STM) adalah wadah menghasilkan tenaga teknisi tingkat menengah. Untuk dapat menghasilkan tenaga teknisi tingkat menengah, peranan guru mempunyai kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar.

Beberapa permasalahan guru STM di lapangan adalah sebagai berikut: (1) ada kecenderungan sarjana FPTK IKIP malas melakukan pekerjaan kotor (Black collar jobs), (2) Sarjana FPTK IKIP lebih senang bekerja di dunia industri dan dunia usaha dari pada menjadi guru STM, (3) para calon guru STM lebih senang bekerja di kota-kota besar dari pada di berbagai daerah seluruh pelosok tanah air, (4) repelita III kebutuhan guru STM sebanyak 13.629 orang, sedangkan guru STM yang ada sebanyak 5.481 orang. Kenyataan di lapangan, masih diperlukan guru STM dalam berbagai jenis spesialisasi dan kualitas tinggi.

Hasil penelitian PPPG Teknologi Bandung yang bekerjasama dengan tenaga ahli dari Australia pada tahun 1979 dan 1980. Penelitian ini dilakukan terhadap 192

orang guru STM di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Temuan penelitian ini menggambarkan kualitas guru STM sebagai berikut: (1) guru STM mengaku belum menguasai sepenuhnya materi pelajaran (teori dan praktek) yang menjadi tanggung jawabnya sebanyak 68 %, (2) guru STM hanya memiliki satu buah buku pegangan dan tidak memiliki serta tidak memakai buku lainnya sebagai referensi sebanyak 53 %, (3) guru STM tidak memiliki target pelajaran yang harus diajarkannya pada satuan waktu semester tertentu. Mereka hanya mengajarkan apa yang sempat mereka ajarkan dengan kondisi, situasi dan waktu yang tersedia sebanyak 84 %.

Temuan penelitian selanjutnya adalah: (4) guru STM tidak melakukan persiapan mengajar secara beraturan sebanyak 52 %, (5) guru STM tidak memakai kurikulum sebagai pegangan program pendidikan yang harus diajarkan. Buku kurikulum dipelajari hanya untuk mengetahui gambaran umum dan setelah itu dilupakan sebanyak 57 %, (6) guru STM absen lebih dari 10 % jam wajib mengajarnya, dan berada di sekolah pada jam-jam mengajar saja sebanyak 46 %, (6) guru STM beranggapan bahwa terlambat datang di sekolah atau terlambat tiba di kelas adalah hal yang wajar sebanyak 63 %, (7) guru STM beranggapan bahwa kebersihan bengkel dan perawatan peralatan bukan tugas dan tanggung jawab mereka sebanyak 77 %.

Temuan penelitian tersebut di atas selanjutnya adalah sebagai berikut: (8) guru STM tidak memperhatikan perkembangan siswanya sebanyak 85 %, (9) guru STM kurang menjelaskan konsep setiap unit pelajaran yang diajarkannya. Sebagai guru praktek mereka hanya menugaskan siswa untuk mengerjakan lembaran kerja yang tersedia sebanyak 70 %, dan (10) guru STM melibatkan peranan dirinya sebagai guru di sekolah dan kurang dapat melihat peranan mereka dalam kerangka pembangunan nasional sebanyak 90 %.

Masalah guru STM meliputi kekurangan dalam penguasaan teori dan keterampilan kejuruan teknik dan penguasaan prinsip-prinsip pendidikan dan metoda mengajarnya, tetapi masalah yang lebih menonjol adalah sikap mental guru yang belum profesional. Pada waktu itu, FPTK IKIP masih terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan guru STM baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan guru STM tersebut di atas, maka dirumuskan kebijaksanaan pengadaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung.

Semenjak tahun 1981 PPPG Teknologi Bandung telah melaksanakan Program D III GKT. Program ini memberikan kualifikasi formal yang bersifat pendidikan sebelum jabatan. Pelaksanaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung, maka terdapat penyimpangan pelaksanaan misi PPPG Teknologi Bandung dan juga terdapat tumpang tindih antara fungsi LPTK dengan fungsi PPPG Teknologi Bandung.

Program Diploma merupakan program pendidikan guru bertaraf pendidikan tinggi, pendidikan guru bertaraf pendidikan tinggi merupakan tugas dan fungsi pendidikan IKIP/FKIP. Untuk itu, Program D III seyogyanya menjadi tanggung jawab fungsional IKIP/FKIP (Santoso S.Hamidjoyo, 1988:12).

Tanggung jawab fungsional mutu pendidikan guru bertaraf pendidikan tinggi adalah kewenangan LPTK. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan, sebaiknya Program D III GKT dikelola oleh LPTK.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bagi pengelola pendidikan dan tenaga kependidikan ialah tanggung jawab fungsional mutu pendidikan guru pada LPTK. Untuk itu, LPTK (IKIP/FKIP) berwenang mengontrol dan memantau serta mengevaluasi persyaratan kurikulum, dosen, pelaksanaan proses belajar dan mengajar, sistem penilaian hasil belajar serta menerima laporan pelaksanaan Program Diploma III.

Fokus utama penelitian ini adalah analisis kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.

Yang dimaksud dengan analisis kebijaksanaan adalah suatu untuk menganalisis kebijaksanaan pemerintah tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi. Analisis kebijaksanaan adalah kajian tentang hakekat, kasus, dan dampak dari berbagai alternatif kebijaksanaan (Stuart S. Nagel,

1980:15). Pengertian analisis kebijaksanaan ini, sejalan dengan pikiran (Thomas R. Dye, 1978:2) yaitu apa yang dilakukan pemerintah tentang kebijaksanaan pendidikan, mengapa pemerintah melakukan kebijaksanaan pendidikan tersebut, dan apa hasil dan dampak kebijaksanaan pendidikan tersebut.

Bidang garapan analisis kebijaksanaan dalam penelitian ini adalah: masalah guru STM di lapangan, landasan hukum merumuskan kebijaksanaan Program D III GKT, unsur perumus kebijaksanaan Program D III GKT, pengelolaan proses belajar dan mengajar yang terdiri dari: kurikulum, personil, sarana dan prasarana, dan mahasiswa. Tamatan Program D III GKT, dampak tamatan Program D III GKT, dan pembinaan dan pengembangan PPPG Teknologi Bandung untuk masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan kualitas guru teknologi adalah mahasiswa tamatan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung yang mempunyai kemampuan dalam metode mengajar dan bidang studi yang akan diajarkannya. Mereka tersebut dipersiapkan untuk menjadi guru STM kelak. Kajian mengenai kualitas guru dikemukakan oleh (Achmad Sanusi, 1984:3) mencakup: tujuan, masukan, proses, dan keluaran.

Sehubungan dengan kualitas guru tersebut, (Alan J. Thomas, 1971:13) mengemukakan bahwa perubahan perilaku manusia, penambahan pengetahuan, perolehan nilai,

dan peningkatan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kualitas guru teknologi dalam penelitian ini mencakup: calon mahasiswa Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung, pelaksanaan proses belajar dan mengajar pada Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung, dan tamatan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung.

Secara umum rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Apakah kebijaksanaan pemerintah tentang Program Diploma III Guru Kejuruan Teknologi pada Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung dapat meningkatkan kualitas guru teknologi?

Secara khusus fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
2. Apakah landasan hukum yang dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
3. Unsur-unsur apakah yang terlibat dalam merumuskan kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?

4. Adakah kaitan tujuan kebijaksanaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
5. Apakah kebijaksanaan yang digunakan dalam menyusun kurikulum Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
6. Apakah kebijaksanaan yang ditempuh dalam membina kualifikasi personil PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
7. Apakah kebijaksanaan yang ditempuh dalam pengaturan sarana dan prasarana yang tersedia pada PPPG Teknologi Bandung dalam upaya peningkatan kualitas guru teknologi?
8. Apakah kebijaksanaan yang dilakukan dalam menetapkan kriteria mahasiswa yang diterima dan kriteria keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung?
9. Apakah kebijaksanaan yang dirumuskan dalam pengelolaan proses belajar dan mengajar Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?
10. Siapakah yang berwenang menerbitkan Ijazah Diploma III dan Akta Mengajar III GKT pada PPPG Teknologi Bandung?
11. Apakah dampak kebijaksanaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung terhadap upaya peningkatan kualitas guru teknologi?

12. Rencana kebijaksanaan manakah yang akan dilaksanakan dalam pembinaan dan pengembangan PPPG Teknologi Bandung pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas guru teknologi?

B. Pentingnya Penelitian

1. Dilihat dari Bidang Administrasi Pendidikan

Penelitian analisis kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi. Penelitian analisis kebijaksanaan pendidikan ini berkaitan erat dengan mata kuliah studi kebijaksanaan yang diberikan kepada Siswa Bidang Studi Administrasi Pendidikan FPS IKIP Bandung.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk perkuliahan studi kebijaksanaan pada bidang studi administrasi pendidikan. Salah satu tujuan ilmu kebijaksanaan dapat membantu membuat keputusan secara efektif dan efisien.

Kajian kebijaksanaan menggunakan pendekatan yang bersifat komprehensif dan interdisipliner. Kajian kebijaksanaan dapat dilakukan pada tahap perumusan kebijaksanaan, pada tahap pelaksanaan kebijaksanaan, dan pada tahap penilaian kebijaksanaan. Perumusan kebijaksanaan merupakan bidang garapan perencanaan. Pelaksanaan kebijaksanaan merupakan bidang garapan penge-

lolaan, dan penilaian kebijaksanaan merupakan bidang garapan penilaian atau pengawasan.

2. Dilihat dari Operasional

Kebijaksanaan pemerintah tentang Program D III GKT, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru STM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut di atas, mengundang bermacam pertanyaan. Kenapa pemerintah merumuskan kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk memenuhi kebutuhan guru STM baik secara kualitas maupun kuantitas?. Kenapa pemerintah tidak mengembangkan FPTK-FPTK IKIP di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan guru STM baik secara kualitas maupun kuantitas?. Kebijaksanaan pemerintah tentang PP-SPTK yang berisi antara lain adanya prinsip keterpaduan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Program Diploma pendidikan guru bertaraf pendidikan tinggi adalah tugas dan fungsi LPTK (IKIP/FKIP).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, diperlukan suatu penelitian untuk menganalisis kebijaksanaan pemerintah tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan tentang kebijaksanaan pemerintah tersebut di atas.

Kalau tidak salah dan sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian tentang studi kebijaksanaan pendidikan masih langka dilakukan oleh para peneliti umumnya dan para Siswa FPS IKIP Bandung khususnya. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis kebijaksanaan pemerintah tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi, dipandang perlu untuk dilaksanakan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan pemerintah tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah peneliti ingin untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis landasan hukum yang dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.

- c. Mendeskripsikan dan menganalisis unsur-unsur yang terlibat dalam merumuskan kebijaksanaan tentang Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis kaitan tujuan kebijaksanaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- e. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan yang digunakan dalam menyusun kurikulum Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- f. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan yang ditempuh dalam membina kualifikasi personil PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- g. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan yang ditempuh dalam pengaturan sarana dan prasarana yang tersedia pada PPPG Teknologi Bandung dalam upaya peningkatan kualitas guru teknologi.
- h. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan yang dilakukan dalam menetapkan kriteria mahasiswa yang diterima dan kriteria keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung.

- i. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijaksanaan yang dirumuskan dalam pengelolaan proses belajar dan mengajar Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.
- j. Mendeskripsikan dan menganalisis yang berwenang menerbitkan Ijazah Diploma III dan Akta Mengajar III GKT pada PPPG Teknologi Bandung.
- k. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijaksanaan Program D III GKT pada PPPG Teknologi Bandung terhadap upaya peningkatan kualitas guru teknologi.
- l. Mendeskripsikan dan menganalisis rencana kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam pembinaan dan pengembangan PPPG Teknologi Bandung pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Bidang Studi Administrasi Pendidikan pada umumnya dan mata kuliah Studi Kebijaksanaan Pendidikan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam proses kebijaksanaan yang terdiri dari: perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan

kebijaksanaan, dan penilaian kebijaksanaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi perumus kebijaksanaan tentang pendidikan dan tenaga kependidikan masa datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi PPPG Teknologi Bandung untuk melaksanakan Program D III GKT secara efektif dan efisien.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi perumus kebijaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan LPTK sebagai satu-satunya wadah pengadaan tenaga kependidikan.
- d. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti dalam Bidang Administrasi Pendidikan pada umumnya dan Studi Kebijaksanaan Pendidikan pada khususnya.
- e. Walaupun penelitian ini merupakan studi kasus pada PPPG Teknologi Bandung, namun hasil penelitian ini mempunyai implikasi praktis terhadap lembaga-lembaga pendidikan lainnya, sepanjang mempunyai karakteristik dan permasalahan yang sama seperti antara lain: PPPG Teknologi Medan, PPPG Teknologi Malang, PPPG Kejuruan Jakarta, PPPG Pertanian Cianjur, dan PPPG Kesenian Yogyakarta. Kajian kebi-

jaksanaan pendidikan ini, amat diperlukan dalam rangka membenahi dan memperbaiki mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang ditempuh oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini disusun berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Ruang lingkup penelitian ini menunjukkan tentang: masalah guru STM di lapangan, landasan hukum merumuskan kebijaksanaan Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung, unsur yang terlibat dalam merumuskan kebijaksanaan Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung, tujuan Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung, pelaksanaan proses belajar dan mengajar Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung yang terdiri dari: kurikulum, personil, sarana dan prasarana, mahasiswa. Tamatan Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung. Dampak tamatan Program D III GKT PPPG Teknologi Bandung untuk memenuhi kebutuhan guru STM baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembinaan dan pengembangan PPPG Teknologi Bandung pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas guru teknologi.

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini dapat dilukiskan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP PENELITIAN:
 ANALISIS KEBIJAKSANAAN PROGRAM D III GKT UNTUK
 MENINGKATKAN KUALITAS GURU TEKNOLOGI
 (Suatu Kajian pada PPPG Teknologi Bandung)



